



► RETRIBUSI DAERAH

## Dishub Jogja Bakal Perluas Parkir Digital

UMBULHARJO—Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja berencana memperluas layanan pembayaran parkir digital, yakni di Tempat Khusus Parkir (TKP) Sriwedari dan Senopati. Sejak Maret lalu Dishub telah melakukan menguji coba pembayaran parkir digital di dua tempat yaitu Jalan Prof. Herman Yohanes dan Limaran sebagai dukungan terhadap gerakan *cashless* (nontunai). "Rencana akan kami perluas di Senopati dan Sriwedari. Tetapi kami siapkan sosialisasi dulu kepada pengelola dan petugas parkirnya, sarannya nanti adalah parkir bus," kata Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Jogja, Imanudin Aziz, Selasa (6/9).

Azis mengatakan Pemkot Jogja bekerja sama dengan Bank Indonesia dan juga Bank BPD DIY. Upaya ini ditempuh untuk memberikan pilihan pembayaran alternatif kepada pengguna jasa parkir selain pembayaran tunai. Konsumen hanya perlu memindai kode batang yang disediakan oleh juru parkir di lokasi dalam melakukan pembayaran.

"Untuk tarif masih sama karena di sana kawasan I premium jadi berlaku tarif progresif yakni Rp2.000 untuk dua jam pertama dan tambah Rp1.500 untuk jam berikutnya," jelas dia.

Menurut Aziz, pembayaran parkir digital di dua tempat itu selama ini belum maksimal. Padahal, ia mengklaim sosialisasi terus dilakukan. Hal ini disebabkan karena pengguna jasa parkir belum terbiasa dengan layanan ini.

Jalan Prof. Herman Yohanes dipilih lantaran pangsa pasar parkir lebih luas dan beragam. Pengunjung pusat perbelanjaan Galeria Mal kadang banyak yang memilih parkir di tepi jalan umum. Sementara di kawasan Limaran sasarnya adalah para pedagang dan pekerja. "Terus terang belum sesuai harapan walaupun juru parkir juga turut menyosialisasikan kepada pengguna jasa dengan menggunakan ID Card yang dilengkapi *barcode QRIS* di samping identitas juru parkir sendiri," ujarnya.

Ketua Paguyuban Parkir Kota Jogja, Ignatius Hanarto, mengatakan penerapan pembayaran parkir digital sebenarnya tidak dipermasalahkan oleh para juru parkir. Namun, implementasinya kadang menimbulkan sisi positif dan negatif bagi para juru parkir. "Di satu sisi memang bisa meminimalkan aksi *rebut* tarif, tetapi kan juru parkir ini mengandalkan pendapatan harian sementara kalau pengguna jasa bayar digital itu masuknya ke bank dulu, sebulan kemudian baru dibayarkan ke juru parkir," ujarnya.

Dia juga menyadari pengguna jasa parkir lebih banyak yang membayar tunai dibandingkan melalui digital. Sebab, kadang kala para juru parkir juga enggan menerima jasa parkir secara digital. (Herald Lasso)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005